

PEMERINTAHAN KABUPATEN SOLOK

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) 2021**



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN SOLOK**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Dinas Sosial Kabupaten Solok telah dapat melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2021 sesuai rencana, serta menyusun laporan pelaksanaan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2021 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2021 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan objektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Solok di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan Pemerintah Kabupaten Solok.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2021 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengevaluasi capaian dan efektifitas program dan kegiatan yang dilakukan serta dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Arosuka, Januari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL



Ir. SYOUFITRI
Nip. 19701115 200502 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Maksud dan tujuan	5
1.3 Struktur Organisasi	6
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II	10
2.1. Perencanaan Strategis	13
2.2. Perjanjian Kinerja	14
BAB III	16
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	16
3.2 Evaluasi dan Analisa Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran	17
3.3 Realisasi Anggaran	46
BAB IV PENUTUP	50
4.1. Kesimpulan	50
4.2. Saran	50

RINGKASAN EKSKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahunan 2021 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 .

Penyusunan LkjIP Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2021 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2021. Dalam upaya merealisasikan good governance, Dinas Sosial Kabupaten Solok telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Solok telah merencanakan dan melaksanakan 6 Program 11 Kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Kabupaten Solok dan sumber dana Tahun Anggaran 2021, untuk mendukung pencapaian 4 Sasaran dalam 4 Indikator (Outcome /Output) yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.539.577.823,- (Lima Milyard Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dinas Sosial mempunyai tugas penting untuk melaksanakan berbagai prioritas yang tercantum di dalam RPJMD 2021-2026. Tugas berat namun sangat mulia ini harus kita lakukan dengan penuh kesungguhan, kreatif, efektif, efisien dan akuntabel. Untuk itu, diperlukan sinergitas dan koordinasi yang baik dari seluruh bidang agar seluruh sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam berbagai dokumen perencanaan, dapat tercapai secara optimal.

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LkjIP Dinas Sosial Kabupaten Solok tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2021, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Sosial Kabupaten Solok tahun 2021, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing bidang yang ada dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Solok.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Solok.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Solok. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok.

1.3 Struktur Organisasi

Menurut Peraturan Bupati Solok nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Pengangkatan anak dan taman anak sejahtera;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Susila, Korban Nafza dan Perdagangan orang.
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 - a. Seksi Perlindungan Sosial, korban bencana alam dan sosial;
 - b. Seksi Perlindungan Sosial, kepahlawanan dan keperintisan;
 - c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga Rentan, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
 - b. Seksi bantuan fakir miskin dan bantuan sosial;
 - c. Seksi pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial;
 - d. Seksi penyuluhan dan sumbangan dana sosial/berhadiah.

Dalam Melaksanakan Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok dibantu oleh 1(satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang masing masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

- a. Pengkoordinasian kegiatan sekretariat untuk memfasilitasi kelancaran tugas bidang sosial;
- b. Pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan perumusan rancangan strategis;
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi;
- e. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang sosial.

2. Bidang Rehabilitasi Sosial

- a. Perumusan konsep langkah kegiatan dibidang rehabilitasi sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang rehabilitasi sosial;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dinas dibidang rehabilitasi sosial;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang rehabilitasi sosial;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. Perumusan konsep langkah kegiatan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dinas dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- c. Pengkoordinasian perencanaan dibidang peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Solok sampai akhir tahun 2021 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 21(dua puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta 16 orang Tenaga Harian Lepas (data per 31 Desember 2021). Latar belakang pendidikan PNS bervariasi mulai SD hingga Strata Dua

(S2).Rekapitulasi pegawai (PNS) berdasarkan pendidikan pada masing-masing Bidang Dinas SosialKabupaten Solok disajikan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1

Rekapitulasi PNS Dinas Sosial Tahun 2021 Berdasarkan Pendidikan dan Bidang

No	Tingkat Pendidikan	Sekretariat	Bidang Resos	Bidang Linjamsos	Bidang Pemberdayaan fakir miskin	Total
1	S2	2	-	-	-	2
2	S1	3	4	3	3	13
3	D3	2	-	-	-	2
4	D2	-	-	-	-	-
5	SMA	1	-	3	-	4
6	SLTP	-	-	-	-	-
7	SD	-	-	-	-	-
Jumlah		8	4	6	3	21

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian Tahun 2021

Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD, Dinas Sosial Kabupaten Solok dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain adalah :

- **Sarana**

Adapun sarana penunjang atau mendukung pelaksanaan tugas fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
DATA SARANA PENDUKUNG
DINAS SOSIAL TAHUN 2020

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Kondisi			Kondisi Kelengkapan (Lengkap Kurang, Mencukupi Atau Lainnya)
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kursi Putar	21	21			Mencukupi
2	Kursi Tamu	7	7			Kurang
3	Meja Biro	10	10			Kurang
4	Meja setengah biro	18	18			Mencukupi
5	Meja kerja	4	4			Kurang
6	Meja computer	3	3			Kurang
7	Almari arsip	10	10			Mencukupi
8	Laptop	2	2			Kurang
9	Filling Kabinet	2	2			Mencukupi
10.	TV	2	2			Mencukupi
11.	Printer	2	2			Kurang
12.	Note Book	3	3			Kurang
13.	Mesin Potong Rumput	1	1			Mencukupi
14.	Mesin Penghisap debu	1	1			Mencukupi

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Kondisi			Kondisi Kelengkapan (Lengkap Kurang, Mencukupi Atau Lainnya)
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
15	Karpet	1	1			Mencukupi

- **Prasarana**

- Tanah

- o Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Tahun pengadaan 1980, seluas 20.480 M² yang terletak di jalan Raya Lubuk Selasih, yang sekarang dipergunakan untuk, Komplek Perkantoran, Asrama, Workshop dan Perumahan Dinas.
 - o Tanah Makam Pahlawan seluas 27.000 M², Tahun pengadaan 2005, yang terletak di Aro Suka.

Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas fungsinya dan Pencapaian Target Kinerja Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Solok didukung oleh anggaran+n yang bersumber dari APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 5.539.577.823,00,- (Lima Milyard Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah). Realisasi keuangan Dinas Sosial sebesar Rp. 4.838.565.642,- (Empat Milyard Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 87%.

Adapun isu-isu yang berkembang pada saat ini yang berhubungan dengan tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Solok dan melihat kepada Isu-isu strategis bidang sosial antara lain adalah :

1. Data PMKS yang tersedia tidak akurat dan belum di verifikasi sehingga menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
2. Masalah kesejahteraan sosial semakin meningkat secara jumlah maupun kompleksitas masalahnya;
3. Masalah kesejahteraan semakin berat melanda semua strata dimana yang lama belum tuntas sudah muncul masalah baru;

4. Terbatasnya sarana, prasarana dan SDM pelayanan kesejahteraan sosial;
5. Meningkatnya permasalahan sosial dari yang klasik sampai pada munculnya fenomena baru;
6. Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat dipedesaan, yang mengakibatkan rendahnya kondisi kehidupan ekonomi masyarakat sehingga berimbas pada kehidupan sosial masyarakat.
7. Penanganan bencana alam yang dilaksanakan umumnya hanya sampai pada tanggap darurat belum sampai pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi.
8. Kurang tersedianya data dan informasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan.
9. Belum optimalnya tata kelola manajemen.

1.4 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021. Capaian Kinerja (*Performance results*) Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) Tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2021 berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Maksud dan Tujuan, Struktur Organisasi dan Sistematika Penyajian;

BAB II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program kegiatan dan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2021 meliputi RPJMD 2016-2021, Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dan Penetapan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2021.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2021.

BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RPJMD 2016-2021

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Sosial berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.

RPJMD Tahun 2016-2021 secara umum bertujuan untuk memberikan arah dan tuntunan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Secara khusus, RPJMD ini bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman kepada unit kerja dan perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja.

Dinas Sosial merupakan salah satu satuan perangkat pemerintah daerah yang menjalankan tugas pokok urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terdapat beberapa agenda prioritas dan sasaran dalam RPJMD 2016-2021 yang harus dilaksanakan. Agenda prioritas, arah kebijakan dan sasaran disajikan pada Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1. Sasaran, Indikator Sasaran dan Arah Kebijakan Dinas Sosial dalam RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Arah kebijakan
3	4	
Misi 2 Meningkatnya pelayanan sosial yang diberikan kepada korban bencana alam/sosial	Persentase (%) Pelayanan Sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dan Pelatihan TAGANA - Penyediaan bantuan logistik bagi korban bencana alam/social

<p>Misi 4 Meningkatnya pelayanan pada sarana dan prasarana dibawah lingkup Dinas Sosial</p>	<p>Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sarana prasarana tupoksi dinas sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya rehabilitasi TMP - Peningkatan kualitas data, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah - Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi penyedia data
<p>Misi 4 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan</p>	<p>Persentase (%) keselarasan program RPJMD kedalam RKPD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas data, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah - Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama dengan instansi penyedia data - Meningkatkan kemampuan aparatur perencana daerah - Penyediaan pedoman dokumen perencanaan - Meningkatkan kounikasi dan koordinasi lintas sektor dan lintas perangkat daerah
<p>Misi 5 Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS</p>	<p>Persentase (%) pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sistem jaminan sosial - Perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan - Peningkatan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin

Sumber : RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021 – 2026 urusan sosial

2.2 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Solok tahun 2016-2021 merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Solok yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Solok telah mengacu kepada RPJMD Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, khususnya terkait dengan 3 misi yaitu misi 2 (Meningkatnya infrastruktur yang berkeadilan), misi misi 4 (Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan misi 5 (Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas).

Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki peran penting dalam penyusunan RPJMD. Selaras dengan penerapan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah prinsip yang sama.

Berikut ini adalah tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok.

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (2021 – 2026)
Dinas Sosial Kabupaten Solok

No	Tujuan	Sasaran	Target	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja sasaran pada tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana		Nilai	Level ketahanan bencana	3	3	3	3	4	4
		Meningkatnya pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial	%	Persentase (%) pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Indeks	Indeks kepuasan masyarakat	3.40	3.45	3.51	3.55	3.60	3.65
		Meningkatnya pelayanan pada sarana dan prasarana dibawah lingkup Dinas Sosial	%	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sarana prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				tupoksi Dinas Sosial						
3	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi		Nilai	Nilai Akuntabilitas kinerja	67 P(B)	69 (B)	70 (BB)	75 (BB)	78 (BB)	80 (BB)
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	%	Persentase (%) keselarasan program RPJMD ke RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Menurunkan tingkat kemiskinan		%	Persentase (%) tingkat kemiskinan	7.56 %	7.31%	7.06 %	6.81 %	6.56 %	6.31 %
		Meningkatkan pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS	%	Persentase (%) pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 Bidang Sosial

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Dinas Sosial kabupaten Solok disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok tahun 2021 secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut :

**TABEL 2.3
PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan Sosial yang diberikan terhadap Korban Bencana Alam/ Sosial	Persentase (%) Pelayanan Sosial yang diberikan terhadap Korban Bencana Alam/ Sosial	100%

2	Meningkatnya pelayanan pada sarana prasarana di bawah lingkup Dinas Sosial	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sarana prasarana tupoksi dinas sosial	100%
3.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase (%) keselarasan program RPJMD ke RKPD	100%
4.	Meningkatnya Pelayanan Sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS	Persentase (%) pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS	100%

Sumber : RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 Bidang Sosial

Tabel 2.4
PROGRAM DAN ANGGARAN DINAS SOSIAL TAHUN 2021

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
		Rp.	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	4.047.054.891,-
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp.	200.557.450,-
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	686.059.150,-
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	385.865.500,-
5.	Program Penanganan Bencana		126.393.750,-
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.	93.647.082,-
JUMLAH		Rp.	5.539.577.823,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja Tahun 2021

Dalam pelaksanaan penyusunan akuntabilitas kinerja diperlukan suatu kerangka pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran, atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan terdiri dari input, output, outcome, benefit dan impact.

Media pengukuran kinerja terdiri dari penetapan kinerja dan pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai pengukuran kinerja berikut:

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Ordinal Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	85% - >100%	Sangat Baik
2.	70% - <85%	Baik
3.	55% - <70%	Sedang
4.	<55%	Kurang Baik

Sumber: Modul 4 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Berdasarkan Sasaran.

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Evaluasi dapat diartikan secara luas ataupun secara sempit. Hal ini dapat dilihat dari siapa yang melakukan evaluasi.

Evaluasi secara menyeluruh antara lain mencakup penilaian terhadap apa yang dilaporkan dan dihasilkan, dan penilaian atas pencapaian hasil; penilaian atas aktivitas, program, kebijakan dan keselarasan dengan misi dan visi organisasi; penilaian atas akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan; penilaian atas pelaksanaan tugas; penilaian kinerja pegawai; penilaian kinerja pengawas; pelanggan, dan pihak ketiga lainnya. Evaluasi menyeluruh ini pada umumnya dilakukan oleh evaluator eksternal. Di samping itu, evaluasi juga dapat dilakukan oleh pihak internal organisasi yang mencakup penilaian atas apa yang telah dicapai organisasi, menghitung nilai capaian dari pelaksanaan kegiatan, dan menghitung nilai capaian kinerja kegiatan tersebut. Evaluasi kinerja yang dimaksud di sini adalah evaluasi yang dilakukan oleh evaluator internal yaitu pihak yang membuat LAKIP itu sendiri.

Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak

tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

3.2.1. Capaian Indikator Kinerja.

Berdasarkan rencana strategis dinas dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, untuk Dinas Sosial ditetapkan 4 sasaran dan dijabarkan dalam 4 indikator sasaran sebagai tolok ukur untuk pencapaian kinerja.

Hasil capaian terhadap 2 sasaran pada Tahun 2021 terdapat 1 indikator kinerja yang lebih dari 85% dan 2 indikator kinerja yang memiliki capaian Lebih dari 70%. Adapun ringkasan capaian indikator kinerja sebagai berikut ini:

Tabel 3.2. Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2021

No	Tingkat Capaian	Jumlah Indikator	Persentase
1.	85% - >100%	4	100%
2.	70% - <85%	-	-
3.	55% - <70%	-	-
4.	<55%	-	-
	Total	4	100%

Secara rinci, realisasi serta capaian untuk masing-masing indikator kinerja disajikan pada tabel 3.3. berikut ini.

Tabel 3.3. Rincian Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Sosial yang diberikan terhadap Korban Bencana Alam/ Sosial	Persentase (%) Pelayanan Sosial yang diberikan terhadap Korban Bencana Alam/ Sosial	%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Pelayanan pada sarana dan prasarana dibawah lingkup dinas sosial	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana tupoksi dinas sosial	%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase (%) keselarasan program RPJMD ke dalam RKPD	%	100%	100%	100%

4	Meningkatnya Pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS	Persentase (%) Pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS	%	100%	100%	100%
---	---	---	---	------	------	------

3.2.2. Analisis Capaian Kinerja.

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, pada masing-masing indikator kinerja. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan hasil capaian tahun-tahun sebelumnya serta kemungkinan tercapainya sasaran Renstra (Rencana Strategis) pada akhir tahun pencapaian pada Tahun 2021.

Analisis terhadap 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra, disajikan sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial

Untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial ditetapkan indikator sasaran yaitu Persentase (%) pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.8. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial	Persentase (%) pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial	%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.8 diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 target Persentase (%) pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial adalah 100% dengan realisasi sebesar 100% dan capaian sebesar 100%.

B. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dala RPJMD

Tabel 3.9.
Capaian Indikator Persentase (%) pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial

No	Indikator Sasaran	Target		Realisasi		Capaian (%)		Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	Target	% capaian
1	Persentase (%) pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sudah tercapai	100%

Berdasarkan tabel 3.9 dapat dilihat bahwa Persentase (%) pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial dari tahun lalu adalah tetap. Pada tahun 2020 dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100%. Sedangkan pada tahun 2021 target 100% dan realisasi 100% dengan capaian 100%.

C. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional, Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Indikator kinerja

No	Indikator Sasaran	Propinsi	Kabupaten
1	3	4	5
1	Persentase (%) pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.10 dapat dilihat bahwa perbandingan Persentase (%) pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial adalah 100% dengan artian seluruh korban bencana alam /sosial yang terjadi telah difasilitasi dengan logistik dan rehabilitasi sosial psikososial.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan kinerja

Tercapainya Kenaikan kinerja pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial disebabkan karena :

1. Daerah Kabupaten Solok termasuk kedalam daerah rawan bencana seperti gempa bumi, banjir, longsor dll
2. Adanya simulasi simulasi rutin untuk menghadapi bencana
3. Peranan TAGANA dan Kampung Siaga Bencana yang ada di Nagari.

4. Adanya partisipasi semua pihak untuk meminimalisir dampak yang timbul akibat bencana.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung capaian indikator level pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial adalah sumber daya yang mendukung sarana dan prasarana. Dimana dalam penanggulangan bencana dibutuhkan TAGANA yang terlatih dan siap siaga dan tersebar di Kecamatan di Kabupaten Solok. Disamping itu dibutuhkan sarana pendukung lainnya seperti bantuan logistik yang cukup untuk didistribusikan kepada korban bencana.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel. 3.11.
Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

No	Program dan Kegiatan		Alokasi dan Realisasi Anggaran			
			Sumber Dana	Jumlah	Realisasi Keuangan	%
1	2		6	7	8	9
A	Program Penanganan Bencana		APBD			
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota				
1		Penyediaan Makanan		126.393.750	92.794.500	73%

G. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatnya pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial adalah :

1. Meningkatkan kemampuan SDM TAGANA dalam kesiapsiagaan bencana yang tersebar pada kecamatan di Kabupaten Solk melalui simulasi dan pelatihan .
2. Menambah pembangunan kampung siaga bencana (KSB) guna meminimalisir terjadinya korban akibat bencana.
3. Melibatkan seluruh masyarakat dalam penanganan bencana
4. Menyediakan bantuan logistik dan psikososial bagi korban bencana
5. Menyiapkan sarana dan prasarana seperti kendaraan roda 4 (rescue dan dapur umum) dan peralatan lainnya untuk meminimalisir korban
6. Cepat tanggap melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan bekerja sesuai dengan tupoksi masing masing institusi.
7. Melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala agar data tetap up date minimal 3 kali dalam satu tahun.

REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA KABUPATEN SOLOK JANUARI S.D DESEMBER 2021

NO.	LOKASI KEJADIAN	TANGGAL KEJADIAN	ALAMAT KEJADIAN KEC/KEL/RT.RW	JENIS BENCANA	PENYEBAB	KK/JIWA TERDAMPAK		KORBAN JIWA				KERUSAKAN			RUMAH TERENDAM	KETERANGAN
								MENINGGAL	HILANG	LUKA/SAKIT	MENGUNGSI	RB	RS	RR		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Jorong Taratak Jarang Nagari Talang Babungo Kec. Hiliran Gumanti	11 Januari 2021	Jorong Taratak Jarang Nagari Talang Babungo Kec. Hiliran Gumanti	Longsor	Hujan Lebat	1	4	-	-	-	4	1	-	-	-	-
2	Jorong Aia Rarak Utara Nagari Kampung Batu Dalam Kec. Danau Kembar	11 Januari 2021	Jorong Aia Rarak Utara Nagari Kampung Batu Dalam Kec. Danau Kembar	Longsor	Hujan Lebat	2	14	-	-	-	14	2	-	-	-	-
3	Nagari Koto Baru Kec. Kubung	12 Januari 2021	Nagari Koto Baru Kec. Kubung	Banjir	Hujan Lebat	217	868	-	-	-	-	-	-	-	212	
4	Nagari Salayo Kec. Kubung	12 Januari 2021	Nagari Salayo Kec. Kubung	Banjir	Hujan Lebat	800	3157	-	-	-	-	-	-	-	791	
5	Nagari Tanjuang Bingkuang Kec. Kubung	12 Januari 2021	Nagari Tanjuang Bingkuang Kec. Kubung	Banjir	Hujan Lebat	25	102	-	-	-	-	-	-	-	25	
6	Nagari Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi	12 Januari 2021	Nagari Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi	Banjir	Hujan Lebat	412	1689	-	-	-	-	-	-	-	408	

7	Nagari Kinari Kec. Bukit Sundi	12 Januari 2021	Nagari Kinari Kec. Bukit Sundi	Banjir	Hujan Lebat	22	59	-	-	-	-	-	-	-	22	
8	Jorong Jambu Nagari Kacang Kec. X Koro Singkarak	12 Januari 2021	Jorong Jambu Nagari Kacang Kec. X Koro Singkarak	Rumah Tertimpa Pohon	Angin Kencang	1	4	-	-	-	-	-	1	-	-	
9	Nagari Batu Bajanjang Kec. Lembang Jaya	12 Januari 2021	Nagari Batu Bajanjang Kec. Lembang Jaya	Banjir Bandang	Hujan Lebat	104	416	-	-	-	-	-	-	-	100	
10	Nagari Kampung Batu Dalam Kec. Danau Kembar	12 Januari 2021	Nagari Kampung Batu Dalam Kec. Danau Kembar	Putting Beliung	Angin Kencang	2	9	-	-	-	-	-	-	2	-	
11	Nagari Koto Laweh Kec. Lembang Jaya	12 Januari 2021	Nagari Koto Laweh Kec. Lembang Jaya	Banjir	Hujan Lebat	24	96	-	-	-	-	-	-	-	24	
12	Jorong Linawan Nagari Sulit Air Kec. X Koto Diatas	16 Januari 2021	Jorong Linawan Nagari Sulit Air Kec. X Koto Diatas	Kebakaran	Masih dalam penyelidikan pihak berwajib	1	4	-	-	-	-	1	-	-	-	Seluruh Rumah Habis terbakar.
13	Jorong Bukik Kili Nagari Koto Baru Kec. Kubung	19 Januari 2021	Jorong Bukik Kili Nagari Koto Baru Kec. Kubung	Kebakaran	Masih dalam penyelidikan pihak berwajib	1	5	-	-	-	-	1	-	-	-	Seluruh Rumah Habis terbakar.
14	Jr. Talang Barat Nagari Talang Babungo Kec. Hiliran Gumanti	26 Januari 2021	Jr. Talang Barat Nagari Talang Babungo Kec. Hiliran Gumanti	Rumah Tertimpa Pohon	Angin Kencang	1	7	-	-	-	-	-	1	-	-	

15	Jorong Karang Putih Nagari Simanau Keca. Tigo Lurah	31 Januari 2021	Jorong Karang Putih Nagari Simanau Keca. Tigo Lurah	Kebakaran	Masih dalam penyelidikan pihak berwajib	1	4	-	-	-	-	1	-	-	-	Seluruh Rumah Habis terbakar.
16	Jr. Kapalo Labuh Nagari Saniang Baka Kec. X Koto Singkarak	1 Februari 2021	Jr. Kapalo Labuh Nagari Saniang Baka Kec. X Koto Singkarak	Kebakaran	Masih dalam penyelidikan pihak berwajib	4	17	-	-	-	-	3	-	-	-	Seluruh Rumah Habis terbakar.
17	Jorong Pasar Jumat Nagari Tanjung Bingkung Kec. Kubung.	16 Februari 2021	Jorong Pasar Jumat Nagari Tanjung Bingkung Kec. Kubung.	Kebakaran	Masih dalam penyelidikan pihak berwajib	1	6	-	-	-	-	1	-	-	-	Seluruh Rumah Habis terbakar.
18	Nagari Batu Bajanjang Kec. Tigo Lurah	25 Maret 2021	Nagari Batu Bajanjang Kec. Tigo Lurah	Kebakaran	Masih dalam penyelidikan pihak berwajib	1	4	-	-	-	-	1	-	-	-	Seluruh Rumah Habis terbakar.
19	Jr. Suliti Nagari Surian	27 Maret 2021	Jr. Suliti Nagari Surian	Kebakaran	Masih dalam penyelidikan pihak berwajib	1	4	-	-	-	-	1	-	-	-	Seluruh Rumah Habis terbakar.
20	Jr. Balai-balai nagari Kacang Kec. X Koto Singkarak	31 Maret 2021	Jr. Balai-balai nagari Kacang Kec. X Koto Singkarak	Angin Putting Beliung	Angin Kencang	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-

21	Nagari Alahan Panjang Kec. Lembah Gumanti	31 - 3 s/d 4-4-2021	Nagari Alahan Panjang Kec. Lembah Gumanti	Banjir	Hujan Lebat	91	239	-	-	-	-	-	-	-	89	-
22	Salayo Tanang Bukik Sileh Kec. Lembang Jaya	31 Maret 2021	Salayo Tanang Bukik Sileh Kec. Lembang Jaya	Angin Putting Beliung	Angin Kencang	2	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-
23	Nagari Kacang Kec. X Koto Singkarak	1 April 2021	Nagari Kacang Kec. X Koto Singkarak	Angin Putting Beliung	Angin Kencang	2	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-
24	Jr. Panariak Nagari Batu Bajanjang Kec. Tigo Lurah	4 April 2021	Jr. Panariak Nagari Batu Bajanjang Kec. Tigo Lurah	Angin Putting Beliung	Angin Kencang	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
25	Nagari Paninggahan Kec. Junjung Sirih	5 April 2021	Nagari Paninggahan Kec. Junjung Sirih	Angin Putting Beliung	Angin Kencang	1	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
26	Nagari Muaro Pingai Kec. Junjung Sirih	5 April 2021	Nagari Muaro Pingai Kec. Junjung Sirih	Angin Putting Beliung	Angin Kencang	1	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
27	Jr. Kajai Nagari Koto Baru Kec. Kubung	14 April 2021	Jr. Kajai Nagari Koto Baru Kec. Kubung	Kebakaran	Masih dalam penyelidikan pihak berwajib	1	4	-	-	-	-	1	-	-	-	Seluruh Rumah Habis terbakar.
28	Nagari Taruang taruang Kex IX Koto Sungai Lasi	21 April 2021	Nagari Taruang taruang Kex IX Koto Sungai Lasi	Longsor	Angin Kencang	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-

36	Nagari Batu Banyak Kec. Lembang Jaya	31 Agustus 2021	Nagari Batu Banyak Kec. Lembang Jaya	Kebakaran	Masih dalam penyelidikan pihak berwajib	1	4	-	-	-	-	1	-	-	-	Seluruh Rumah Habis terbakar.
37	Nagari Aie Dingin Kec. Lembah Gumanti	13 September 2021	Nagari Aie Dingin Kec. Lembah Gumanti	Kebakaran	Masih dalam penyelidikan pihak berwajib	1	6	-	-	-	-	1	-	-	-	Seluruh Rumah Habis terbakar.
38	Nagari Salayo Kec. Kubung	16 September 2021	Nagari Salayo Kec. Kubung	Kebakaran	Masih dalam penyelidikan pihak berwajib	1	4	-	-	-	-	1	-	-	-	Seluruh Rumah Habis terbakar.
39	Nagari Taruang taruang Kex IX Koto Sungai Lasi	28 September 2021	Nagari Taruang taruang Kex IX Koto Sungai Lasi	Longsor	Angin Kencang	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
40	Nagari Saok Laweh Kec Kubung	28 September 2021	Nagari Saok Laweh Kec Kubung	Banjir	Angin Kencang	48	184	-	-	-	-	-	-	1	-	-
41	Nagari Guguk Sarai	28 September 2021	Nagari Guguk Sarai	Longsor	Angin Kencang	3	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-
42	Nagari Aie Dingin Kec. Lembah Gumanti	28 September 2021	Nagari Aie Dingin Kec. Lembah Gumanti	Kebakaran	Masih dalam penyelidikan pihak berwajib	2	7	-	-	-	-	1	-	-	-	Seluruh Rumah Habis terbakar.

43	Nagari Koto Gadang Guguk	30 September 2021	Nagari Koto Gadang Guguk	Putting Beliung	Angin Kencang	1	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
44	Nagari Sirukam Kec. Payung Sekaki	30 September 2021	Nagari Sirukam Kec. Payung Sekaki	Putting Beliung	Angin Kencang	1	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
45	Nagari Salayo Kec. Kubung	8 Oktober 2021	Nagari Salayo Kec. Kubung	Kebakaran	Masih dalam penyelidikan pihak berwajib	1	6	-	-	-	-	1	-	-	-	Seluruh Rumah Habis terbakar.
46	nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang	16 November 2021	nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang	Kebakaran	Masih dalam penyelidikan pihak berwajib	1	4	-	-	-	-	1	-	-	-	Seluruh Rumah Habis terbakar.
47	Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar	29 November 2021	Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar	Angin Putting Beliung	Angin Kencang	1	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
48	Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar	29 November 2021	Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar	Angin Putting Beliung	Angin Kencang	2	10	-	-	-	-	-	-	2	-	-
49	Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh Kecamatan Lembang Jaya	1 Desember 2021	Nagari Salayo Tanang Bukik Sileh Kecamatan Lembang Jaya	Angin Putting Beliung	Angin Kencang	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-

50	Nagari Sirukam Kec. Payung Sekaki	22 Desember 2021	Nagari Sirukam Kec. Payung Sekaki	Kebakaran	Masih dalam penyelidikan pihak berwajib	1	6	-	-	-	-	1	-	-	-	Seluruh Rumah Habis terbakar.
JUMLAH						1798	7065									

asasan 2. Meningkatnya pelayanan pada sarana dan prasarana dibawah lingkup Dinas Sosial

Untuk pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan pada sarana dan prasarana dibawah lingkup Dinas Sosial ditetapkan indikator sasaran yaitu Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana tupoksi dinas sosial.

Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.12. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pelayanan pada sarana dan prasarana dibawah lingkup Dinas Sosial	% pelayanan pada sarana dan prasarana dibawah lingkup Dinas Sosial	%	100%	78,14%	78,14%

Berdasarkan tabel 3.12 diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 target persentase pada sarana dan prasarana dibawah lingkup Dinas Sosial adalah 100% dengan realisasi sebesar 78.14% dan capaian sebesar 78,14%.

A. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dala RPJMD

Tabel 3.13.

Capaian Indikator % pelayanan pada sarana dan prasarana dibawah lingkup Dinas Sosial

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)		Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	Target	% capaian
1	% pelayanan pada sarana dan prasarana dibawah lingkup Dinas Sosial	100%	100%	100%	78,14%	100%	78,14%	Sudah tercapai	

Berdasarkan tabel 3.13 dapat dilihat bahwa perbandingan persentase % pelayanan pada sarana dan prasarana dibawah lingkup Dinas Sosial dari tahun lalu adalah 100%. Pada tahun 2020 dari target sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100%. Sedangkan tahun 2021 ditargetkan 100% dan terealisasi sebesar 78,14%.

B. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional, Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Tabel 3.14

Perbandingan Realisasi Indikator kinerja

No	Indikator Sasaran	Propinsi	Kabupaten
1	3	4	5
1	% pelayanan pada sarana dan prasarana dibawah lingkup Dinas Sosial	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.14 dapat dilihat bahwa perbandingan % pelayanan pada sarana dan prasarana dibawah lingkup Dinas Sosial sebesar 100% dan sama dengan propinsi.

C. Analisis Penyebab Keberhasilan kinerja

Tercapainya persentase % pelayanan pada sarana dan prasarana dibawah lingkup Dinas Sosial sebesar 100% yang disebabkan karena :

1. Adanya program dan kegiatan yang mendukung peningkatan sarana dan prasarana di lingkup sosial
2. Sarana dan prasarana digunakan untuk kelancaran kegiatan kepahlawanan dan hari jadi negara RI

D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung capaian indikator persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sarana prasarana tupoksi dinas sosial adalah pilar pilar sosial (PSM, TKSK, Pendamping PKH, Tagana, dll) yang siap dalam memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat terutama dalam ikut serta memeriahkan peringatan upacara 10 november dan 16 Agustus di Taman Makam Pahlawan.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel. 3.15.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

No	Program dan Kegiatan	Alokasi dan Realisasi Anggaran			
		Sumber Dana	Jumlah	Realisasi Keuangan	%
1	2	6	7	8	9
A	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	APBD			
I	Pemeliharaan Taman Makam Pahlwan Nasional Kabupaten/ Kota				

1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	20.959.582	16.560.150	79%
2	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	72.187.500	53.822.500	74%

Sumber : DPA Dinas Sosial Kab. Solok

F. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk Meningkatnya pelayanan pada sarana dan prasarana dibawah lingkup Dinas Sosial adalah :

- a. Meningkatkan upaya rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada di dinas sosial
- b. Meningkatkan anggaran rehabilitasi bangunan taman makam pahlawan agar pengunjung dapat merasa puas dengan sarana prasarana yang ada.
- c. Mengajukan proposal kegiatan melalui Kementerian Sosial dalam hal menambah sarana dan prasarana

98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
□ nilai / Unsur	303	313	305	362	298	324	310	274	324	
NRR / Unsur	3.03	3.13	3.05	3.62	2.98	3.24	3.10	2.74	3.24	28.13
NRR tertbg / unsur	0.33	0.34	0.34	0.40	0.33	0.36	0.34	0.30	0.36	3.09
IKM unit pelayanan										78.14

	1			1						
	1									1
1			1							
39	61	4	23	55	0	17	1			
100	100									

Keterangan

- :
 - U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
 - NRR = Nilai rata-rata
 - IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
 - *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
 -**) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
 NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi

NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,11

IKM UNIT PELAYANAN : 78.14

Mutu Pelayanan :

- A** (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
B (Baik) : 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

No	UNSUR PELAYANAN
U1	Persyaratan
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
U3	Waktu Penyelesaian
U4	Biaya/Tarif
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6	Prilaku Pelaksana
U7	Kompetensi Pelaksana
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
U9	Sarana dan Prasarana

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi

Untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi ditetapkan indikator sasaran yaitu Persentase (%) keselarasan program RPJMD ke RKPD

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.16.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase (%) keselarasan program RPJMD ke RKPD	%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 3.16 diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 target Persentase (%) keselarasan program RPJMD ke RKPD adalah 100% dengan realisasi sebesar 100% dan capaian sebesar 100%.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah program dan dokumen perubahan RKPD Tahun 2021 yang selaras dengan program RPJMD yang harus dilaksanakan sebanyak 6 program dan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun 2021 sebanyak 6 program.

B. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dala RPJMD

Tabel 3.17.
Capaian Indikator % Persentase (%) keselarasan program RPJMD ke RKPD

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)		Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	Target	% capaian
1	Persentase (%) keselarasan program RPJMD ke RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sudah tercapai	

Berdasarkan tabel 3.16 dapat dilihat bahwa perbandingan Persentase (%) keselarasan program RPJMD ke RKPD dari tahun lalu adalah 100%. Pada tahun 2020 dari target

sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100%. Sedangkan tahun 2021 ditargetkan 100% dan terealisasi sebesar 100%.

C. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional, Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Indikator persentase keselarasan RPJMD kedalam RKPD tidak ada standar nasional/propinsi/kabupaten/kota sehingga tidak dapat dibandingkan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan kinerja

Tercapainya Indikator persentase keselarasan RPJMD kedalam RKPD sebesar 100% yang disebabkan karena seluruh program dan kegiatan yang ada di Dinas Sosial diprioritaskan kepada penanggulangan wabah covid-19 baik dana yang bersumber dari APBD / APBN

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung capaian indikator persentase keselarasan RPJMD kedalam RKPD adalah sumber daya manusia , sumber daya waktu dan sumber daya anggaran. Dengan adanya SIPD maka sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pencapaian sasaran ini menjadi berkurang.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel 3.18 Alokasi dan realisasi Anggaran Tahun 2021

No	Program dan Kegiatan	Alokasi dan Realisasi Anggaran			
		Sumber Dana	Jumlah	Realisasi Keuangan	%
1	2	6	7	8	9
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	APBD	5.539.577.823		
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		127.903.500	127.350.700	100%
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		35.247.000	24.386.350	69%
	3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.056.684.336	2.915.204.592	95%
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah				

	4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		9.308.090	6.612.100	71%
	5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		46.506.100	54.591.900	99%
	6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		111.696.365	69.238.450	62%
	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		13.024.000	4.950.000	38%
	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		326.734.500	267.050.300	82%
	9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APBD			
	9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		960.000	506.500	53%
	10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		13.077.000	6.618.000	51%
	11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APBD			
	11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		268.670.000	255.729.927	95%
	12	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		37.244.000	33.990.000	91%

Sasaran 4. Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS

Untuk pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS ditetapkan indikator sasaran yaitu Persentase pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS.



PPKS terdiri dari 26 komponen yang terdiri dari berbagai macam pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Dari 26 komponen tersebut hanya 25 komponen yang ada di Kabupaten Solok . Dari 25 komponen PPKS tersebut, fakir miskin merupakan penyumbang tertinggi angka PPKS yaitu 7,56%. Untuk jumlah penduduk kabupaten solok dipakai data yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Jumlah PPKS Kabupaten Solok didapat dari pendataan yang dilakukan setiap tahun oleh PSM, TKSK, Peksos. Khusus data fakir miskin, Dinas Sosial mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat statistik.

Untuk tahun 2021 BPS merilis data penduduk miskin Kabupaten Solok sebanyak 28.789 jiwa sehingga dapat angka PPKS Kabupaten Solok sebanyak 39.608 jiwa. Sedangkan data penduduk Kabupaten Solok yang dirilis Disdukcapil adalah sebesar Jiwa

A. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.19. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS.	% pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS	%	100%	71%	71%

Berdasarkan tabel 3.19 diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 target persentase pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS adalah 100% dengan realisasi sebesar 71% dan capaian sebesar 71%.

B. Perbandingan antara target, realisasi kinerja dan Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu serta target jangka menengah yang terdapat dala RPJMD

Tabel 3.19.

Capaian Indikator % pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)		Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	Target	% capaian
1	% pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS	100%	100%	5.10	71%	5,1%	71%	Sudah tercapai	

Berdasarkan tabel 3.19 dapat dilihat bahwa perbandingan persentase pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS dari tahun lalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 dari target sebesar 100% terealisasi sebesar 5.10% dengan capaian 5,1%. Sedangkan tahun 2021 ditargetkan 100% dan terealisasi sebesar 71% dengan capaian 71%.

C. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional, Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Tabel 3.19

Perbandingan Realisasi Indikator kinerja

No	Indikator Sasaran	Propinsi	Kabupaten
1	3	4	5
1	% pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS	65%	71%

Berdasarkan Tabel 3.19 dapat dilihat bahwa perbandingan persentase pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS sebesar 71% berada diatas Propinsi dengan nilai 65%.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan kinerja

Terjadi kenaikan persentase pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS sebesar 71% yang disebabkan karena :

1. Banyaknya bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat melalui program jaring pengaman sosial seperti PKH, bantuan sembako dan bantuan sosial tunai (BST) baik melalui APBD/APBN menyebabkan meningkatnya keinginan masyarakat yang belum menerima bantuan sosial untuk diusulkan sebagai penerima manfaat bantuan sosial maupun manfaat jaminan perlindungan sosial.
2. Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang berperan sebagai penghubung atau mediator bagi masyarakat dalam rangka pengusulan data terpadu kesejahteraan sosial yang menjadi acuan atau rujukan dasar bagi masyarakat untuk menerima program bantuan sosial maupun perlindungan sosial dan juga bantuan komplementer yang bersumber dari dana Kementerian Sosial maupun dana Kementerian lainnya yang terkait. Contoh : Syarat untuk mendapatkan subsidi listrik, pengurusan KIP, RTLH dll
3. Adanya fungsi dan peran Dinas Sosial sebagai instansi yang menaungi mitigasi bencana yang merupakan bentuk kehadiran Pemerintah dalam rangka membantu masyarakat secara moril maupun materiil yang terdampak bencana.

Tabel 3.20.**Data KPM PKH (Program Keluarga Harapan) dan Nominal di Kabupaten Solok Tahun 2016-2021**

Tahun	Jumlah KPM	Nominal
2021	15.691	Rp. 12.503.625.000
2020	14.909	Rp. 44.727.000.000
2019	15.823	Rp. 10.898.150.000
2018	16.451	Rp. 6.563.620.000
2017	7.895	Rp. 3.947.500.000
2016	7.962	Rp. 2.800.321.939

Sumber: Data PKH (Program Keluarga Harapan) Dinas Sosial

Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program nasional bagi masyarakat kurang mampu untuk dapat berwirausaha sesuai dengan kondisi dan keadaan didaerahnya sehingga dapat menambah income pendapatan masyarakat tersebut.

Berdasarkan tabel 3.20 diatas alokasi dana untuk PKH sebesar Rp. 12.503.625.000 yang dibagikan kepada 15.691 KPM.

Tahun 2021 alokasi anggaran PKH sebesar Rp. 12.458.898.000,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 44.727.000.000,-. Ini mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar Rp. 32.223.375.000,- .

Untuk KPM PKH tahun 2021 sebesar 15.691 jiwa dan tahun 2020 dengan KPM sebesar 14.909 jiwa. Ini mengalami kenaikan jumlah KPM sebesar 782 jiwa pada tahun 2021 yang disebabkan karena jumlah kuota KPM dari Kementerian Sosial RI bertambah.

Tabel 3.21.**Data KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di Kabupaten Solok Tahun 2017-2021**

Tahun	Jumlah KUBE	Nominal(Rp)
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	12 KELOMPOK	265.000.000
2017	30 KELOMPOK (APBN)	442.000.000
	30 KELOMPOK (DEKONSENTRASI)	600.000.000
	6 KELOMPOK (APBD)	120.000.000

Sumber: Data KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Dinas Sosial

**SEBARAN GAMBARAN UMUM PENERIMA PROGRAM BANSOS KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2021**

NAMA KECAMATAN	PKH	BPNT		PBI/BPJS	JUMLAH AGEN E WARUNG
		PPKM	BPNT		
PANTAI CERMIN	4.694 Jiwa	991 KK	1.405 KK	7.850	4
LEBAH GUMANTI	8.970 Jiwa	2344 KK	2242 KK	17.610	8
PAYUNG SEKAKI	1.624 Jiwa	475 KK	485 KK	3.542	2
TIGO LURAH	4.061 Jiwa	604 KK	1.022 KK	4.670	2
JUNJUNG SIRIH	1.993 Jiwa	453 KK	492 KK	4.004	2
HILIRAN GUMANTI	5.108 Jiwa	989 KK	1240 KK	8.548	4
IX KOTO SUNGAI LASI	2.013 Jiwa	469 KK	664 KK	4.134	8
X KOTO SINGKARAK	5.387 Jiwa	1.590 KK	1.444 KK	11.478	5
DANAU KEMBAR	3.905 Jiwa	946 KK	998 KK	7.231	4
LEMBANG JAYA	6.998 Jiwa	1.613 KK	1.827 KK	12.700	7
X KOTO DIATAS	4.181 Jiwa	979 KK	1.184 KK	7.654	4
KUBUNG	7.738 Jiwa	2.229 KK	2.084 KK	17.436	4
BUKIT SUNDI	3.886 Jiwa	1.247 KK	1.2000 KK	8.927	8
GUNUNG TALANG	7.752 Jiwa	2.201 KK	2.293 KK	16.976	12
JUMLAH TOTAL	68.311 Jiwa	19.412 KK	19.832 KK	134.228 Jiwa	74



Penyerahan KKS (Kartu Kesejahteraan Sosial) di Kecamatan Hiliran Gumanti



Penyerahan Sembako di Kecamatan Hiliran Gumanti

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan untuk mendukung capaian indikator persentase (%) pelayanan sosial terhadap PSKS melalui pemberdayaan PSKS dalam dokumen perencanaan adalah sumber daya manusia, sumber daya waktu dan sumber daya anggaran. Dengan adanya aplikasi SIKNG (Sistem Informasi Kesejahteraan Next Generation) sangat mendukung dalam efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan waktu. Disamping itu adanya pilar pilar sosial sebanyak 208 orang yang tersebar di Kabupaten Solok yang akan memberikan pelayanan secara langsung kepada PPKS.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel. 3.20.
Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

No	Program dan Kegiatan		Alokasi dan Realisasi Anggaran			
			Sumber Dana	Jumlah	Realisasi Keuangan	%
1	2		6	7	8	9
A	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
	I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
	1	Penyediaan Permakanan		233.790.550	165.396.550	71%
	2	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga		78.959.300	69.539.000	88%
	3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		61.138.050	42.049.425	69%
	4	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		75.294.000	55.753.850	74%
	5	Pemberian Layanan Kedaruratan		173.441.500	131.652.000	76%
	6	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		63.435.750	51.870.500	82%
B	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					

	II	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota				
	7	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		385.865.500	258.720.389	67%
C	Program Pemberdayaan Sosial					
	III	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
	8	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		6.110.000	670.000	11%
	9	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota		194.447.500	133.507.950	69%

G. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan persentase pelayanan sosial yang diberikan kepada PPKS melalui pemberdayaan PSKS adalah :

- d. Melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan adar data yang ada lebih up-date
- e. Memberikan bantuan sosial berupa Rastra, BPNT, PKH dan BPJS.
- f. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui bantuan permodalan
- g. Meningkatkan anggaran perlindungan sosial melalui perluasan program bantuan sosial dan premi asuransi Kesehatan masyarakat miskin.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Adapun Total Anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2021 adalah sebesar 5.539.577.823,- (Lima Milyard Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 4.838.565.642,- (Empat Milyard Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dengan penyerapan sebesar 87%.

Tabel 3.21 Alokasi dan realisasi Anggaran Tahun 2021

No	Program dan Kegiatan		Alokasi dan Realisasi Anggaran			
			Sumber Dana	Jumlah	Realisasi Keuangan	%
1	2		6	7	8	9
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		APBD	5.539.577.823		
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		127.903.500	127.350.700	100%
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		35.247.000	24.386.350	69%
	3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.056.684.336	2.915.204.592	95%
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		9.308.090	6.612.100	71%
	5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		46.506.100	54.591.900	99%
	6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		111.696.365	69.238.450	62%
	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		13.024.000	4.950.000	38%
	8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		326.734.500	267.050.300	82%
	9	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	APBD			
	9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		960.000	506.500	53%
	10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		13.077.000	6.618.000	51%
	11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	APBD			

		Urusan Pemerintah Daerah				
	11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		268.670.000	255.729.927	95%
	12	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		37.244.000	33.990.000	91%
B	Program Pemberdayaan Sosial		APBD			
	13.	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota				
	13.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		6.110.000	670.000	11%
	14.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota		194.447.500	133.507.950	69%
C	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
	15	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
	15	Penyediaan Permakanan		233.790.550	165.396.550	71%
	16	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga		78.959.300	69.539.000	88%
	17	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		61.138.050	42.049.425	69%
	18	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		75.294.000	55.753.850	74%
	19	Pemberian Layanan Kedaruratan		173.441.500	131.652.000	76%
	20	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		63.435.750	51.870.500	82%
D	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					

	21	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota				
	21	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		385.865.500	258.720.389	67%
E	Program Penanganan Bencana		APBD			
	22	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota				
	22	Penyediaan Makanan		126.393.750	92.794.500	73%
F	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		APBD			
	23	Pemeliharaan Taman Makam Pahlwan Nasional Kabupaten/ Kota				
	23	Pemeliharaan Taman Makam Pahlwan Nasional Kabupaten/ Kota		20.959.582	16.560.150	79%
	24	Pengamanan Taman Makam Pahlwan Nasional Kabupaten/ Kota		72.187.500	53.822.500	74%

Sumber : DPA Dinas Sosial Kab. Solok

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Sosial merupakan instansi Pemerintah yang diberikan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial ini menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2021.

B. Saran

1. Dalam rangka mempertegas fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang Sosial perlu mempererat peran masing-masing bidang sehingga lebih efektif mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu pada RPJMD dan Renstra SKPD.
2. Diharapkan adanya terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja /Anggaran dari pola "Atas ke Bawah" menjadi "Bawah Ke Atas" sehingga mencerminkan kebutuhan Organisasi.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan akan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan apabila semua *Stake Holder Internal* dapat bersinergi dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut.
4. Monitoring dan Evaluasi harus ditingkatkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. Perlunya koordinasi yang mantap didalam tubuh organisasi guna memperoleh ketepatan penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan dapat sesuai RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dan Penetapan Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Solok.

Arosuka, Januari 2022
Kepala Dinas Sosial



Ir. SYOUFITRI
Nip. 19701115 200502 2 002

